

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Makalah, Artikel

- Affandi, Dasril, 2006, *Peranan Hukum dalam Investasi Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- Bakhri, Syaiful, 2013, *Migas Untuk Rakyat: Pergulatan Pemikiran dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta.
- Chandranegara, Ibnu Sina, *Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017
- Hayati, Tri, et al., 2005, *Laporan Penelitian: Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Setjen Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung.
- Hanley, Nick, et al. 1997, *Environmental Economics: in Theory and Practice*, Plgrave Macmilan, New York.
- Hatta, Mohammad, 1977, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta.
- Kaplow, Louis, dan Steven Shavell, "Economic Analysis of Law", [http://www.law.harvard.edu/faculty/shavell/pdf/99\\_Economic\\_analysis\\_of\\_law.pdf](http://www.law.harvard.edu/faculty/shavell/pdf/99_Economic_analysis_of_law.pdf), diakses 9 Mei 2017.

Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, “Rencana Strategis 2015-2019”, <http://www.migas.esdm.go.id/public/images/uploads/posts/renstra-migas-2015-2019.pdf>, diakses 20 Mei 2017.

Magnar, Kuntana, et al., 2007, Laporan Penelitian: Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 33 UUD 1945: Studi atas Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Permohonan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, Pusat Studi Kebijakan Negara Unpad, Bandung.

Manan, Bagir, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.

Manan Bagir, 1995, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Tidak Dipublikasikan, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mathis, Klaus dan Deborah Shannon, “Richard Posner’s Theory of Wealth Maximization”, <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4020-9798-0.pdf>, diakses 01 September 2017.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Citra

Aditya Bakti, Bandung.

Notonegoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara,

Jakarta.

Wiratno, R. dkk., 1958, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, PT

Pembangunan, Jakarta.

Patmosukismo, Suyitno, 2011, *Migas: Politik, Hukum & Industri: Politik*

*Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia Dikaitkan dengan*

*Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan*

*Perekonomian Nasional*, PT Fikahati Aneksa, Jakarta.

Richard A. Posner, 2011, *Economic Analysis of Law*, Aspen Publisher, New

York

Posner, Richard A., "Utilitarianism, Economics, and Legal Theory", *The*

*Journal of Legal Studies*, Vol. 8, No. 1, Januari 1979.

Rahman, Dudi, "Revitalisasi dan Pengembangan Kilang Baru Wujudkan

Kemandirian Energi", [http://www.dunia-energi.com/revitalisasi-dan-](http://www.dunia-energi.com/revitalisasi-dan-pengembangan-kilang-baru-wujudkan-kemandirian-energi/)

[pengembangan-kilang-baru-wujudkan-kemandirian-energi/](http://www.dunia-energi.com/revitalisasi-dan-pengembangan-kilang-baru-wujudkan-kemandirian-energi/), diakses 02

Mei 2017.

Rahmani, Vanya Edria, 2016, *Tinjauan Atas Pengusahaan Minyak dan Gas*

*Bumi di Indonesia: Mencari Bentuk yang Ideal*, Skripsi, Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Rofiq, Anwar, 2013, *Tata Kelola Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di*

*Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-*

X/2012, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Rustamaji, Muhammad, “Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum dalam Pandangan Richard A Posner”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 1, April 2013.

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, “Outlook Energi Indonesia 2016”,

[https://www.esdm.go.id/assets/media/content/outlook\\_energi\\_indonesia\\_2016\\_opt.pdf](https://www.esdm.go.id/assets/media/content/outlook_energi_indonesia_2016_opt.pdf), diakses 20 Mei 2017.

Sornarajah, M., 1995, *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press, Cambridge

Sugianto, Fajar, “Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil dan Perkembangan Akademik Hukum dan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, Februari 2014.

Sutedi Adrian, 2009, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta

Zaidun, Muchammad, ”Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan”, *Pidato*, Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 12 Juli 2008.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing;

Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi;

Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan  
Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri;

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang  
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di  
Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas  
Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek  
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan  
Infrastruktur;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2016 tentang Perubahan  
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang  
Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek  
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan  
Infrastruktur;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2016  
tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Di Dalam Negeri  
Oleh Badan Usaha Swasta;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008  
tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas  
Bumi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas  
Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-X/2012 tentang Pengujian  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas  
Bumi.